

KONTROVERSI LOTTO DALAM PELAKSANAAN PON VII TAHUN 1969 DI SURABAYA

DWI REDHA IKTAMALA

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya
E-Mail: dwindeddy16@gmail.com

Agus Trilaksana
Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Kondisi perekonomian pada awal masa kepemimpinan Orde Baru sangat buruk. Pemerintah Orde Baru berusaha mengatasi inflasi yang sangat tinggi. Inflasi ini sudah terjadi pada akhir pemerintahan Orde Lama. Kota Surabaya yang ditetapkan sebagai tuan rumah PON ke-VII tahun 1969 merasa kesulitan untuk mencari dana. Kas pemerintah Jawa Timur tidak cukup dan KONI pusat tidak mengeluarkan dana sedikitpun untuk acara tersebut. Sehingga, lotto dipilih untuk mendanai PON ke-VII dengan izin Menteri Sosial. Hal tersebut menimbulkan banyak kontroversi didalam masyarakat.

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka rumusan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Mengapa program lotto dijadikan sebagai sumber pendanaan pelaksanaan PON di Surabaya tahun 1969? 2) Bagaimana respon masyarakat terhadap adanya program lotto untuk pendanaan dalam pelaksanaan pesta olahraga PON ke-VII di Surabaya?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan latarbelakang lotto dijadikan sumber pendanaan pelaksanaan PON ke-VII di Surabaya tahun 1969. Dan untuk menganalisis respon masyarakat terhadap adanya lotto dalam pelaksanaan pesta olahraga PON ke-VII di Surabaya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik (pencarian data), yang ditemukan berupa arsip dokumen, majalah, Dalam penelusuran sumber peneliti juga melakukan wawancara. Peneliti juga menggali sumber dari Koran dan buku sekunder. Selanjutnya peneliti melakukan kritik (pengujian validitas data) dengan cara memilih dan memilah data yang sesuai dengan tema penelitian. Setelah itu melakukan interpretasi (penafsiran terhadap data), dan tahap terakhir adalah historiografi (penulisan sejarah).

Hasil penelitian yang diperoleh adalah sbb, 1) Latarbelakang pengadaan Judi Lotto untuk mendanai PON VII adalah karena terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1960-an. Surabaya yang ditunjuk sebagai pelaksana PON VII akhirnya memutuskan untuk mencari dana yang cepat dan mudah dari Judi Lotto. 2) Pendanaan pelaksanaan PON VII di Surabaya dengan melalui Undian Lotto menyebabkan terjadinya kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Banyak masyarakat yang pro terhadap undian lotto, tetapi juga banyak yang menentangnya, terutama dari kalangan ulama.

Kata Kunci: Judi, PON ke-VII, Kota Surabaya.

Abstract

The condition of the economy at the beginning of Orde Baru leadership very badly. New order Government tried to cope with a very high inflation. Inflation has already happened at the end of Orde Lama. Surabaya, which is set to host the PON VII in 1969 felt it difficult to find funding. The East Java Government cash is not enough and do not remove KONI's center at all for the event. So, lotto was chosen for the PON VII financed with the permission of Minister of Social Affairs. It raises a lot of controversy in the community.

Based on the above background, the formulation in this study as follows: 1) why lotto programs serve as a source of funding for the implementation of the PON in Surabaya at 1969? 2) how are community response to the presence of program lotto for funding athletics in the implementation of the PON VII in Surabaya?. The purpose of this research is to explain the background of lotto became sources of funding the implementation of the PON VII in 1969. And to analyse the response of the community towards the presence of lotto in the implementation of the Athletics PON VII in Surabaya.

This research uses the methods of historical research which include heuristics (search data), which is found in the form of archive documents, magazines, search the resources researchers also conduct interviews. Researchers also dug from the newspaper and book sources are secondary. Next researchers conducting criticism (testing the validity of data) and how to select and sort data according to the theme of research. After that do the interpretation (interpretation of data), and the last stage is the historiography (the writing of history).

The research results obtained are, 1) with both Gambling Lotto to fund procurement PON VII is due to the onset of the economic crisis at 1960. Surabaya is designated as implementing PON VII finally decided to look for a

quick and easy funds from Gambling Lotto. 2) Funding implementation PON VII in Surabaya via Lottery Lotto led to controversy in the midst of the community. A lot of people who are against Lottery lotto pro, but also many that oppose him, particularly from among the clergy.

Keywords: gambling, PON VII, the city of Surabaya.

PENDAHULUAN

Judi merupakan salah satu kegiatan yang mempertaruhkan suatu hal, yang biasanya dimainkan oleh sekelompok orang. Judi dapat memberikan efek kesenangan dan harapan untuk dapat memenangkan permainan tersebut melihat hal yang dipertaruhkan sangat menggiurkan. Pada saat seseorang bermain judi, minat dan harapan yang di milikinya semakin tinggi serta meningkatnya rasa tegang disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah dalam permainan tersebut. Judi bersifat rekreatif untuk melepas ketegangan setelah seseorang lelah melakukan pekerjaannya sehari-hari di tempat kerja. Judi dapat diklasifikasikan menurut peristiwa dan bentuknya. Klasifikasi judi menurut peristiwanya berupa transaksi-transaksi berdasarkan pertaruhan dan spekulasi, aktivitas-aktivitas agen totalisator, dan macam-macam lotre (nalo, lotto, lotre butut, dan lain-lain).¹ Sedangkan klasifikasi judi menurut bentuknya, ialah berbentuk permainan dan undian yang legal dengan izin pemerintah, serta bentuk permainan dan undian yang ilegal.²

Di Indonesia, judi juga pernah dilegalkan oleh pemerintah dengan tujuan agar dapat membantu perbaikan pembangunan daerah-daerah yang ada di Indonesia, berupa undian. Hal ini, telah dinyatakan oleh Direktorat Jenderal Bantuan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia bahwa undian diatur dalam Undang-undang tanggal 27 Juli 1954 No.22 ayat 1 dan 2. Jakarta merupakan kota pertama di Indonesia yang melegalkan perjudian sekitar tahun 1966, dalam bentuk Lotto (*Lotere Totalisator*) dan Nalo (*National Lotery*) yang diatur oleh Yayasan Bencana Alam Departemen Sosial Republik Indonesia. Pada tahun 1966, Jakarta dibawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin yang mengambil keputusan untuk melegalkan perjudian untuk pembangunan Kota Jakarta dan kepentingan masyarakat Jakarta. Seperti perbaikan dan pembuatan jalan, kampung, sekolah, puskesmas, juga gelanggang remaja dan gelanggang mahasiswa.³ Gubernur Ali Sadikin mengatur perjudian tersebut hanya untuk kalangan tertentu, yaitu orang-orang yang dalam hidupnya tidak bisa hidup tanpa judi dan sering pergi keluar negeri (biasanya Macau) hanya untuk bermain judi.

Surabaya merupakan kota yang menjadi pusat perekonomian di Jawa Timur. Kota Surabaya merupakan sebuah kota dagang yang memiliki letak yang strategis, sehingga sering menjadi persinggahan pedagang-pedagang dari luar negeri. Surabaya memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia terutama pada masa Kolonial. Kota Surabaya dikenal sebagai kota

industri dan perdagangan. Namun, saat terjadi inflasi pada tahun 1962, harga-harga naik rata-rata enam kali lipat dengan tingkat kenaikan pertahunnya mencapai 17%.⁴ Inflasi yang terjadi juga ikut mempengaruhi perekonomian Kota Surabaya yang berimbas pada macetnya produktifitas industri dan terjadi kelangkaan barang serta terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran. Tidak mungkin Kota Surabaya bergantung pada pemerintah pusat untuk melaksanakan pembangunan Kota Surabaya, mengingat kondisi perekonomian Indonesia sedang mengalami inflasi yang di mulai sejak tahun 1962. Melihat keberhasilan pembangunan Kota Jakarta dengan melegalkan perjudian, Wali Kota Surabaya juga bermaksud meniru apa yang telah dilakukan Gubernur Ali Sadikin terhadap pembangunan Kota Jakarta.⁵ Akhirnya, pemerintah Kota Surabaya memutuskan untuk melegalkan judi untuk membantu pembangunan kotanya. Pelegalan perjudian di Surabaya mendapatkan izin Menteri Sosial. Lotre totalisator merupakan perjudian yang mendapat legal dari pemerintah. Judi legal yang pertama kali di Surabaya dikenal dengan nama *Lotim* (Lotto Jatim). Dalam permainan lotto, cara dan aturannya sama dengan lotre pada umumnya. Pemain dapat menebak angka yang kira-kira akan keluar.

Saat Kota Surabaya ditunjuk sebagai tuan rumah PON VII tahun 1969, pemerintah Kota Surabaya berusaha menggalang dana untuk PON yang akan dilangsungkan. Penunjukan Kota Surabaya sebagai tuan rumah PON ke-VII dirasakan membebani. Hal ini dikarenakan kas daerah yang tidak mencukupi untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga tersebut. Apalagi, KONI pusat tidak memberikan biaya sepeser pun. Berarti, pemerintah daerah harus membiayai sendiri acara tersebut.

Akhirnya, Kolonel Acub Zainal selaku ketua Panitia Besar PON ke-VII tahun 1969 memutuskan untuk membiayai pelaksanaan PON VII tahun 1969 menggunakan lotto (*Lotery Totalisator*), yang dikenal dengan nama LOTTO PON. Lotto PON diadakan untuk memperbaiki fasilitas olahraga di Kota Surabaya dan juga memperbaiki infrastruktur yang ada di Kota Surabaya untuk kelancaran acara PON ke- VII tersebut. Dari hasil lotere tersebut, pemerintah Surabaya berhasil membangun Stadion Tambaksari, yang dikenal dengan Stadion Gelora 10 November 1945.

Pengadaan lotto dalam PON ke-VII banyak mendapat reaksi keras dari masyarakat, utamanya golongan ulama di Jawa Timur. Golongan ulama menentang penyelenggaraan lotto tersebut karena dianggap menyimpang dari ajaran agama dan dianggap

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 63.

² *Ibid.*

³ __, *Pers Bertanya Bang Ali Menjawab*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm 102.

⁴ *Ibid*, hlm 36.

⁵ Nurinwa Ki. S Hendrowinoto dkk, *M. Jasin "Saya Tidak Pernah Minta Ampun Kepada Soeharto"*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm 65.

sebagai judi yang jelas-jelas sangat dilarang di dalam agama Islam. Namun, banyak juga kalangan yang mendukung pengadaan lotto dalam PON ke-VII dengan alasan dapat membantu pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pembangunan demi lancarnya perayaan pesta olahraga empat tahunan tersebut.

Adanya kontroversi terhadap diadakannya Lotto dalam PON ke-VII, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul *"Kontroversi Lotto Dalam Pelaksanaan PON VII Tahun 1969 di Surabaya"*. Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, penelitian ini lebih memfokuskan pada tahun 1969. Karena pada tahun tersebut PON VII dilaksanakan, tepatnya pada tanggal 26 Agustus-06 September 1969. Selama pelaksanaan lotto PON berlangsung banyak terjadi pro-kontro di tengah masyarakat terkait lotto PON tersebut untuk pendanaan PON VII.

Berdasarkan latar belakang dan batasan masaah tersebut di atas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Mengapa program lotto dijadikan sebagai sumber pendanaan pelaksanaan PON di Surabaya tahun 1969?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap adanya program lotto untuk pendanaan dalam pelaksanaan pesta olahraga PON ke-VII di Surabaya?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah meliputi tahap heuristik untuk mendapatkan arsip, dokumen atau surat kabar/majalah *Sketsmasa* dan *Liberty* sejaman, buku, artikel, dan lain sebagainya.

Sumber primer dari penelitian ini didapat dari beberapa dokumen arsip yang didapat di kantor Arsip Kota Surabaya, diantaranya Arsip Kota Surabaya No. Definitif 736 berisi tentang penolakan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Mojokerta terhadap lotto PON yang beredar diwilayahnya, Arsip Kota Surabaya No. Definitif 740 berisi tentang perizinan peredaran lotto Jatim, Arsip Kota Surabaya No. Definitif 909 berisi tentang perizinan pelegalan lotto di Kota Surabaya. sumber primer lainnya berupa Koran/majalah sejaman yang didapat di Perpustakaan Medayu Agung dan STIKOSA AWS, diantaranya majalah *Sketsmasa* No. 92-th-XII-1969 "Pasang Nomor Lotto" yang ditulis Benno R berisi untung ruginya bermain lotto dan jenis judi lainnya. Majalah *Liberty* No. 827, 12 Juli 1969 "Mbah R.A Rahaju" yang ditulis Ichsan Ridha berisi tentang peramal angka lotto yang banyak didatangi masyarakat. Kompas edisi 3 Juni 1969 "Lotto Surya Madju" berisi perolehan lotto Surya yang mengalami peningkatan dan berhasil digunakan untuk membangun beberapa sekolah dasar. Sumber primer juga didapat melalui wawancara.

Tahap kedua yakni kritik, untuk mendapatkan data sejarah yang harus diverifikasi dengan sumber lain yang sesuai untuk menemukan fakta sejarah. Tahap ketiga adalah interpretasi untuk menganalisis sumber yang saling berkaitan sesuai tema penelitian. Tahap yang terakhir

adalah historiografi yang disajikan dalam bahasa yang mudah dan sesuai dengan kaidah penulisan.

PEMBAHASAN

A. Perjudian di Kota Surabaya Tahun 1960-an

Perkembangan kondisi sosial masyarakat Kota Surabaya dapat dilihat dari penambahan penduduk yang begitu pesat. Sejak tahun 1960, penambahan penduduk di Indonesia mengalami pertumbuhan sekitar 2% pertahunnya. Masalah yang menjadi pokok utama yang dihadapi Indonesia adalah penyebaran penduduk dan kepadatannya di Pulau Jawa dan Madura. Kepadatan penduduk di Jawa dan Madura disebabkan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup pesat serta angka kematian yang menurun. Pertumbuhan penduduk Indonesia dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:⁶

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 1930-1976

	Penduduk (juta)			Pertumbuhan rata-rata setiap tahun		
	1961	1971	1976	1930-1961	1961-1971	1971-1976
Jawa-Madura	53,2	62,4	67,9		1,6	1,7
Pedesaan	9,8	13,7	15,1	-	3,4	2,0
Perkotaan						
Jumlah	63	76,1	83,0	1,4	1,9	1,8
Luar Jawa-Madura						
Pedesaan	29,5	36,0	40,2	-	2,0	2,2
perkotaan	4,6	7,1	8,6	-	4,4	3,9
Jumlah	34,0	43,1	48,8	1,9	2,4	2,5
Indonesia						
Pedesaan	82,7	98,4	108,1	-	1,8	1,9
Perkotaan	14,4	20,8	23	-	3,7	2,6
Jumlah	97,0	199,2	131,8	1,5	2,1	2,0

Sumber: diolah dari sumber Gustav F. Papanek. 1987. *Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Gramedia. Hlm 6.

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa tahun 1960-1976 jumlah penduduk Indonesia senantiasa mengalami pertumbuhan yang cepat. Dalam rentang waktu 1961-1971 Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk sebanyak 102,2 juta jiwa, dengan rata-rata mencapai mencapai 2,1%. Kemudian pada tahun 1979 penduduk Indonesia menurun menjadi 131,8 juta jiwa dari yang semula mencapai 199,2 juta jiwa di tahun 1971. Hal tersebut diduga karena pada tahun 1970-an pemerintah berhasil menerapkan program KB (Keluarga Berencana) sehingga dapat menekan pertumbuhan penduduk.

Pertengahan dasawarsa tahun 1960-an adalah masa suram bagi perekonomian Indonesia. Tingkat produksi dan investasi di berbagai sektor utama

⁶ *Ibid*, hlm 6.

menunjukkan kemuduran sejak tahun 1950.⁷ Pendapatan per kapita dalam tahun 1966 lebih rendah daripada tahun 1930. Pemerintah Orde Baru yang memegang kekuasaan setelah runtuhnya Orde Lama, memberikan prioritas utama dalam pemulihan perekonomian di Indonesia dengan cara mengadakan kebijakan sanering dan kebijakan efisiensi anggaran. Pemberlakuan kebijakan sanering⁸ terhadap tingginya inflasi yang tengah terjadi menyebabkan menurunnya produktifitas industri di Kota Surabaya serta kelangkaan barang-barang kebutuhan di pasaran, sehingga harga barang-barang di pasaran semakin tinggi. Pada tahun 1966 dan 1967, harga bahan-bahan pokok di pasaran sangat mahal, utamanya gula pasir yang mengalami peningkatan tiga kali lipat dibandingkan dengan harga pada tahun 1965. Berikut adalah harga bahan-bahan pokok yang ada di pasaran Kota Surabaya Tahun 1965-1967:⁹

Tabel 2.3
Harga Rata-rata Bahan Makanan dan Beras dalam Pasir di Surabaya

No.	Nama Barang	Satuan	Daftar Harga (dalam Rp.)		
			1965 u.l*	1966 u.l	1967 u.b**
1	Beras Tuton No. 1	1 kg	230,-	8000	14,-
2	Beras Tuton No. 2	1 kg	220,-	8000	12,-
3	Gula Pasir	1 kg	500,-	7500	20,-
4	Gula Kelapa	1 kg	170,-	5750	10,50,-
5	Garam	1 kg	30,-	1000	3,-
6	Minyak Kelapa	600 cc	500,-	6500	18,50,-
7	Minyak Tanah	600 cc	30,-	1000	1,50,-
8	Teri Asin	1 kg	900,-	14000	30,-
9	Ikan Asin	1 kg	750,-	18000	30,-
10	Pohung	1 kg	25,-	4000	2,-

⁷ LP3ES, *Ekonomi Orde Baru*, (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm 1.

⁸ Sanering adalah pemotongan nilai mata uang menjadi sepersepuluh dari nilai mata uang kertas yang beredar. Kebijakan ini diambil pemerintah untuk mengatasi inflasi yang tengah terjadi di masyarakat. Kebijakan diberlakukan berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 27 tahun 1965, yang berisi pemberlakuan uang baru yang memiliki perbandingan nilai 1000 kali lipat dari uang lama.

⁹ Diolah dari laporan Seksi Statistik bulan Mei 1965 dan Bagian Ekonomi Kotamadya Surabaya. Bulan September 1966 dan Januari 1967, *Arsip Kota Surabaya* No. 51. 359 Box 1963 dan No. 42.276 Box 1744...dalam Dedy Hendro Subekti, *Reaksi Masyarakat Surabaya Terhadap Tingginya Inflasi dan Kebijakan Sanering*, (Skripsi Mahasiswa Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Airlangga, 2007, tidak diterbitkan), hlm 44.

11	Kacang Ose Merah	1 kg	300,-	5000	8,-
----	------------------	------	-------	------	-----

Sumber : Laporan Seksi Statistik Surabaya dan Bagian Perekonomian Kotamadya Surabaya.

Keterangan: * u.l = uang lama (sebelum Orde Baru).

** u.b = uang baru.

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa kebijakan sanering berdampak pada harga-harga barang yang tersebar di pasaran. Sebelum dan sesudah dilaksanakannya kebijakan sanering menyebabkan adanya perbedaan harga-harga barang di pasaran yang sangat mencolok. Jika pada tahun 1965-1966 pemerintah pemerintah masih menggunakan uang lama, harga bahan makanan yang paling tinggi dipegang oleh komoditas ikan teri dan ikan asin masing-masing seharga Rp. 14.000,- dan Rp. 18.000,- tiap kilonya. Saat diterapkan penggunaan uang baru pada tahun 1967 harga berubah menjadi satuan, bukan dalam ribuan lagi. Setelah adanya kebijakan sanering, barang yang memiliki harga tertinggi di pasaran di Kota Surabaya adalah gula pasir seharga Rp. 20,-, ikan teri asin seharga Rp. 30,-, dan ikan asin seharga Rp. 30,-.

Pada masa Masa Orde Baru, pemerintah mengizinkan pelegalan judi melihat perekonomian masyarakat Indonesia yang mengalami krisis pada masa Orde Lama, dan berdampak pada pembangunan daerah-daerah di Indonesia. Melalui ijin Menteri Sosial, pemerintah Indoensia memberikan pelegalan terhadap judi demi berlangsungnya pembangunan daerah di Indonesia dan judi yang dilegalkan ialah berupa undian. Pelegalan judi undian ini telah diatur dalam Undang-undang tanggal 27 Juli 1954 No. 22.

International Corner Sarinah merupakan lokalisasi judi pertama di Kota Surabaya yang bertempat di Jl. Tunjungan dan resmi dibuka pada tanggal 24 Mei 1969, tempat ini hanya untuk kalangan beruang. Selain itu, di Kota Surabaya ada permainan *adu doro*, permainan ini mengandung unsur judi dengan hewan merpati sebagai medianya. Permainan *adu doro* ini juga dapat digunakan sebagai sarana rekreatif dan hiburan oleh masyarakat Kota Surabaya kalangan menengah ke bawah.

Contoh di atas menunjukkan bahwa jauh sebelum adanya pelegalan perjudian, masyarakat Kota Surabaya telah bermain judi dengan cara yang sederhana dan cukup unik. Sehingga, dapat dikatakan bahwa perjudian bukan hal tabu di kalangan masyarakat Kota Surabaya. Di bawah akan dibahas jenis-jenis perjudian yang dimainkan masyarakat Kota Surabaya, baik judi legal maupun illegal pada tahun 1960-an sampai terselenggaranya Lotto PON di Surabaya.

1. Jajasan Dana Bantuan (JDB).

Undian Jajasan Dana Bantuan ini marak di kalangan masyarakat Kota Surabaya sekitar tahun 1960-an. Sebenarnya undian ini sudah ada sejak tahun 1954 bersamaan dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1954. Undian Jajasan Dana Bantuan ini diselenggarakan oleh Yayasan Rehabilitasi sosial yang mempunyai fungsi untuk mengumpulkan dana untuk masalah-masalah sosial

yang tengah terjadi di masyarakat. Undian ini juga mempunyai tujuan untuk menertibkan perjudian-perjudian yang beredar di masyarakat dan agar dana yang dikeluarkan oleh masyarakat tidak terbuang sia-sia tapi masuk ke dalam kas negara. Hasil dari undian ini nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat untuk membantu usaha masyarakat di bidang kesejahteraan sosial.

2. Lotere Butut.

Lotere butut merupakan sebuah permainan judi yang tidak resmi dan sangat meresahkan pemerintah. Meskipun perjudian jenis ini illegal tapi minat masyarakat sangat tinggi dan masyarakat yang menjadi pembelinya juga sangat ramai. Hal ini dikarenakan ulah para bandar yang menyebarkan kabar burung dari mulut ke mulut perihal nomor yang akan keluar dalam undian nanti, sehingga masyarakat tertarik untuk membelinya meskipun dengan harga yang lebih mahal. Padahal, nomor yang disebutkan oleh para bandar tersebut belum tentu keluar dalam pengundian nantinya.

3. Hwa-Hwee.

Merupakan salah satu permainan judi yang berasal dari Negeri China dan pernah berkembang di Kota Jakarta Raya pada awal Januari 1968 pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin. Hwa-Hwee merupakan permainan judi yang bersifat legal dan pelaksanaannya mendapat izin dari pemerintah. Kota Surabaya menindaklanjuti legalitas perjudian ini dengan cara mengadakan pelokalisasi di daerah-daerah tertentu, dan pelokalisasi ini dikenal dengan karantina judi.¹⁰ Penindaklanjutan ini diambil agar pemerintah Kota Surabaya mudah dalam melakukan penertiban terhadap masyarakat yang bermain judi Hwa-Hwee. Bentuk permainan judi Hwa-Hwee sama dengan lotere, di mana para pemain harus menebak dan memasang angka-angka yang telah diprediksi sebelumnya akan keluar. Angka yang digunakan dalam pemasangan nomor judi Hwa-Hwee ini berjumlah 36 dan 38 angka. Cara pengundian judi Hwa-Hwee ini dengan cara menggantung nomor yang akan dikeluarkan sehari sebelum acara penarikan undian di Jalan Pencindilan.¹¹

4. NALO (*National Lotery*).

Nalo merupakan salah satu jenis permainan judi undian yang dilegalkan pemerintah di bawah naungan Departemen Sosial melalui Yayasan Rehabilitasi Sosial sebagai pengganti undian Jajasan Dana Bantuan. Undian ini juga mempunyai fungsi yang sama dengan undian Jajasan Dana Bantuan, yaitu mencari dana untuk membantu menuntaskan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Masyarakat yang membeli nomor undian Nalo secara tidak langsung sama dengan ikut membantu daerah lain yang membutuhkan bantuan. Melalui surat izin Menteri Sosial No. B. A. 5-5-21/19 tanggal 31 Mei 1968, Yayasan Rehabilitasi Sosial mulai mengeluarkan Nalo seri A. Suksesnya Nalo seri A membuat pemerintah mengambil inisiatif untuk

menambah jenis Nalo, yaitu Nalo seri B. Nalo seri B dikeluarkan melalui surat izin No. B. A. 5.2.3/4 tanggal 19 Februari 1969 untuk diedarkan di masyarakat.¹² Rincian pendapatan Nalo dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.¹³

Tabel 2.4
Pertanggungjawaban Pendapatan Nalo tahun 1968

No.	Macam-macam Bantuan yang Telah disalurkan	Jumlah (Rp.)	Jumlah (%)
1	Hadiah	Rp. 204.798.335	36
2	Daerah Jakarta	Rp. 36.287.190	6
3	Daerah Jawa Tengah	Rp. 15.287.000	2,6
4	Daerah Jawa Timur	Rp. 4.287.000	0,7
5	Daerah Jawa Barat	Rp. 2.950.000	0,5
6	Daerah Yogyakarta	Rp. 925.000	0,2
7	Daerah Sumatera Selatan	Rp. 500.000	0,1
8	Komisi Agen	Rp. 87.770.715	15
9	Administrasi Eksploitasi	Rp. 58.513.810	10
10	Yayasan Adi Darma	Rp. 29.256.905	5
11	Yayasan Rumah Sosial	Rp. 87.770.715	15
12	Pembangunan Sosial Daerah Setempat	Rp. 58.513.810	10
	Jumlah Keseluruhan	Rp. 585.138.100	100

Sumber : *Pendapatan Nalo Tahun 1968*, dalam *Kedaulatan Rakyat*, 12 Nopember 1968

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan Nalo paling banyak digunakan biaya hadiah sebesar Rp. 204.798.335,- yang akan diberikan kepada masyarakat yang berhasil menebak angka yang akan keluar dengan benar. Pendapatan terendah digunakan untuk pembiayaan pembangunan sosial daerah-daerah yang turut serta dalam pelaksanaan undian nalo sebesar Rp. 58.513.810,-, untuk pembangunan panti asuhan, balai desa dan puskesmas. Daerah yang pendapatan Nalo paling banyak dipegang oleh Jakarta Raya Rp. 36.287.190 dan yang paling rendah dipegang oleh Sumatera Selatan sebesar Rp. 500.000,-. Melihat kesuksesan penjualan Nalo di masyarakat menyebabkan munculnya beberapa polemik, diantaranya adanya penyelewengan yang terjadi di Badan Usaha Nalo karena kurangnya kontrol dari Yayasan Rehabilitasi Sosial,¹⁴ berupa pembengkakan pengeluaran yang dilakukan oleh yayasan tersebut, yang terdiri atas pengeluaran gaji yang sangat tinggi.¹⁵

¹² Rina Krisnawati..., *Loc. Cit*, hlm 36.

¹³ ...”Berdasarkan konferensi pers yang dilakukan oleh Ketua Umum Yayasan Rehabilitasi Sosial, Pasila Sth di rumahnya di Jalan Kebayoran Baru.”...dalam *Kedaulatan Rakyat*, tanggal 12 Nopember 1968.

¹⁴ ...”Pimpinan Nalo menyatakan bahwa adanya pengeluaran hasil Nalo yang belum dipertanggungjawabkan kepada pimpinan harian Nalo. Pengeluaran tersebut berupa uang sebesar Tiga Puluh Satu Juta Rupiah, yang tidak diketahui anggaran uang tersebut.”...dalam *Kedaulatan Rakyat*, tanggal 13 Nopember 1968.

¹⁵ ...”menurut Pasila Sth, Ketua Yayasan Rehabilitasi Sosial, adanya instruksi mengenai peraturan gaji dan tata susunan organisasi yang dikeluarkan tidak dilaksanakan.

¹⁰ *Karantina Judi*, dalam *Surabaya Post*, tanggal 20 April 1968.

¹¹ Benno R, *Pasang Nomor Lotto*, dalam *Majalah Sketsmasa* No. 92- Th. XII-1969, hlm 9.

Walikota Surabaya, Kolonel Sukotjo, berencana mengambil inisiatif untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Ali Sadikin yang menjabat sebagai Gubernur Jakarta Raya pada saat itu, yaitu dengan memulai usaha untuk melegalkan perjudian di Kota Surabaya untuk masyarakat luas di Kota Surabaya demi tetap berjalannya pembangunan kotanya. Apalagi pemerintah Kota Surabaya juga ingin semua hasil pendapatan pelegalan judi tersebut dapat masuk ke kas pemerintah Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya juga ingin mengelola pelegalan judi tersebut secara mandiri tanpa harus ada campur tangan pemerintah pusat.

Pada tanggal 9 Oktober 1967, Walikota Surabaya mengajukan permohonan izin kepada Menteri Sosial untuk melakukan pelegalan Lotto (*Lotere Totalisator*) untuk wilayah Kota Surabaya. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan lotto nantinya akan dialokasikan untuk memperbaiki serta membangun sarana dan prasarana yang ada di Kota Surabaya.

Pada tanggal 15 Mei 1968 melalui Surat Keputusan No. B. A. 5-4-44/71, akhirnya pemerintah pusat melalui Menteri Sosial memberikan izin kepada pemerintah Kota Surabaya untuk menyelenggarakan lotto secara resmi. Penyelenggaraan lotto di Kota Surabaya antara tahun 1968 sampai 1969 terdapat beberapa nama-nama lotto yang muncul. Jenis lotto ini sama, namun nama dan fungsinya berbeda, yaitu:

a. Lotto Jawa Timur (Lotim).

Penyelenggaraan lotto ini mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Timur, Mohammad Noer. Lotto ini tidak hanya diadakan di Kota Surabaya, tetapi juga di semua daerah di Jawa Timur, lotto ini dikenal dengan Lotto Jawa Timur. Lotim berpusat di Kota Surabaya serta diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pengundian Lotto Jatim pertama kali diberlakukan pada tanggal 30 Juli 1968. Pengundian Lotim dilakukan seminggu sekali yaitu pada hari Selasa jam 17.00 WIB, di Kota Surabaya pengundian dilakukan di Taman Surya.

DPRD-GR Provinsi Jawa Timur tidak menyetujui lotto diedarkan keseluruh daerah Jawa Timur. Hal tersebut di karenakan banyak masyarakat yang tidak setuju peredaran lotto tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan kebijakan baru, yaitu mengganti Lotto Jatim dengan Lotto Surya. Kebijakan ini juga telah disetujui oleh Gubernur Jawa Timur melalui Surat Keputusannya pada 4 April 1968 No. Gub/ 76/78. Kementrian Sosial Republik Indonesia juga menyetujui perubahan nama lotto tersebut. Konsekuensi yang didapat dari kebijakan ini ialah wilayah peredaran Lotto Surya yang makin dipersempit, yakni hanya wilayah Kota Surabaya saja.

a. Lotto PON

Berdasarkan penamaannya, lotto ini diselenggarakan untuk penunjang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-VII pada tahun 1969 di Surabaya. Lotto digunakan untuk pendanaan PON ke-VII dikarenakan minimnya dana yang dimiliki pemerintah Kota Surabaya. Waktu yang dimiliki pemerintah Kota

Surabaya untuk mencari dana penyelenggaraan PON VII tahun 1969 sangat terbatas.

Lotto PON resmi di mulai pada tanggal 14 Februari 1969 berdasarkan izin Menteri Sosial No. B. A. 5-2-24/18 yang bertujuan untuk menghimpun dana untuk berlangsungnya PON ke-VII. Lotto PON berada di bawah kendali Panitia Besar PON VII tahun 1969. Penyelenggaraannya dilakukan tiga kali seminggu, yakni pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu bertempat di Markas Panitia Besar PON VII di Jl. Pemuda No.15 pada jam 22.00 WIB. Akses pembelian kupon Lotto PON sama dengan Lotto Surya, yakni Jl. Pemuda, Yos Sudarso, Embong Malang sampai THR.

Pendapatan lotto PON selain digunakan untuk pendanaan pelaksanaan PON VII tahun 1969, juga digunakan untuk merenovasi serta membangun fasilitas penunjang PON VII. Stadion Tambaksari merupakan salah satu contoh bangunan yang direnovasi oleh pemerintah Kota Surabaya dengan biaya Rp. 222.000.000,-.¹⁶ Biaya pembangunan tersebut menggunakan hasil lotto PON dan perenovasian stadion tersebut dilakukan hanya dalam waktu delapan bulan. Hasil lotto PON juga digunakan untuk membangun sekolah-sekolah dasar dan perbaikan jalan raya.

b. Lotto Surya.

Pada tanggal 23 Oktober 1968, Badan Usaha Lotto mengeluarkan Surat Keputusan No. 086/SIIIA/BULD/68 tentang perubahan nama Lotto Jatim menjadi Lotto Surya.¹⁷ Kebijakan yang dibuat pemerintah Kota Surabaya mengenai penggantian nama serta penyempitan wilayah penyebaran lotto, telah dibicarakan sejak bulan September 1968.¹⁸ Meskipun telah direncanakan jauh-jauh hari, namun lotto Surya resmi dimainkan pada bulan Maret 1969 yaitu satu bulan setelah lotto PON diadakan.¹⁹ Hal tersebut di sebabkan kebutuhan untuk pendanaan acara PON VII tahun 1969 lebih mendesak dan harus segala diadakan persiapan-pesiapan penunjang PON VII tahun 1969. Fungsi dari penyelenggaraan lotto ini tetap sama, yakni untuk perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana Kota Surabaya. Penggantian nama ini juga diikuti dengan perubahan ketentuan penyelenggaraan Lotto Surya dan Lotto PON. Adapun perubahan ketentuan tersebut, sebagai berikut:²⁰

a. Maksimal *tombokan* lotto senilai Rp. 50,-. Besar hadiah yang didapat yaitu 35 kali lipat, sehingga maksimal hadiah yang didapat, yaitu Rp. 50,-x35= Rp. 1.750,-. Ketentuan ini berlaku untuk setiap nomor yang dipasang.

¹⁶ *Pembukaan PON VII Jang Tjemerlang Gemilang*, dalam Majalah *Sketsmasa* No. 98-th-XII-1969, hlm 4-3.

¹⁷ *Arsip Kota Surabaya* No. Definitif 909.

¹⁸ *Ketentuan Lotto Surya*, dalam *Surabaya Post*, Tanggal 5 Oktober 1968.

¹⁹ Lotto PON diselenggarakan lebih dahulu daripada Lotto Surya, yakni pada tanggal 14 Februari 1969.

²⁰ ...”berdasarkan penuturan Letnan Kadarisman selaku Humas Lotto Surya”...*Idjin Lotto Mung Nganti Akir Desember Taun Iki*, dalam Majalah *Jayabaya*, Tanggal 31 Agustus 1969.

Ketetapan gaji yang ada di Yayasan Rehabilitasi Sosial ini menyamakan gaji yang di dapat karyawan Lotto Jaya.”... *Ibid*.

- b. Ketentuan kedua adalah pengaturan tempat penjualan kupon lotto agar jauh dari lingkungan anak-anak, utamanya sekolah. Hal ini bertujuan untuk menghindari lotto dari jangkauan anak-anak dan menghindari terlibatnya anak-anak dalam permainan maupun penjualan lotto.
- c. Lotto PON dan Lotto Surya bersifat lokal dan memiliki wilayah edar hanya di Kota Surabaya.
- d. Penarikan nomor bersifat spekulatif dan nomor yang keluar tidak diketahui sebelum pengundian berlangsung.
- e. Dana yang terkumpul digunakan untuk pembangunan gedung sekolah, JKB dan pembangunan rumah-rumah bagi tunawisma.
- f. Penyelenggaraan lotto harus sudah dihentikan pada akhir Desember tahun 1969.

Pengundian lotto dilakukan tiga kali dalam seminggu, yakni hari Senin, Rabu dan Jum'at. Para pemasang nomor maupun penonton berdatangan pada jam 22.00 WIB di Jl. Simpang Dukuh No.1 Surabaya.²¹

Lotto Jatim, lotto PON dan lotto Surya penyelenggaraannya bersamaan dengan Nalo. Nalo seri A yang diadakan pemerintah pusat pada tanggal 31 Mei 1968 bersamaan dengan diadakan lotto Jatim pada 30 Juli 1968, kemudian Nalo seri B yang diadakan pemerintah pusat pada 19 Februari 1969 bersamaan dengan diadakannya lotto PON yang diadakan 14 Februari 1969 dan lotto Surya pada bulan Maret 1969. Keduanya, Nalo dan Lotto, penyelenggaraannya berjalan bersama. Hanya saja tujuan pendapatan keduanya yang berbeda.

B. LOTTO SEBAGAI PENDANAAN PON KE-VII TAHUN 1969 DI KOTA SURABAYA

1. Terpilihnya Kota Surabaya Sebagai Tuan Rumah PON VII.

Interaksi politik dan olahraga sudah lama terjalin dan menempatkan olahraga sebagai alat pemersatu Bangsa Indonesia, utamanya paska kemerdekaan. Salah satu contohnya adalah PON I yang diadakan pada 12 Desember 1948 di Kota Solo, Surakarta. Penyelenggaraan PON tahun 1969 sebagai wujud perlawanan terhadap Belanda yang pada semena-mena menduduki kembali wilayah-wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan di bonceng oleh Sekutu. PON yang diadakan pada waktu itu juga sebagai wujud penegasan eksistensi Indonesia di mata dunia.²²

Tahun 1965, perpolitikan di Indonesia sempat memanas dikarenakan terjadinya peristiwa G30S/PKI. Peristiwa ini menyebabkan ditundanya perhelatan PON ke-VI yang rencananya akan diadakan di Jakarta. Sehingga satu tahun kemudian, pemerintah menggantinya

dengan kegiatan-kegiatan olahraga yang berskala provinsi, perhelatan olahraga ini di kenal dengan nama PORWIL (Pekan Olahraga Wilayah).

Batalnya PON ke-VI menyebabkan Mayjen Supardi yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Olahraga kewalahan berpikir keras untuk menentukan daerah mana yang akan dijadikan sebagai tuan rumah PON selanjutnya, yaitu PON ke-VII. Pada sidang paripurna MUSAORNAS yang pertama tanggal 26-29 Februari 1968, Kota Banjarmasin ditetapkan sebagai tuan rumah PON ke-VII. Namun, gubernur Kalimantan Selatan menolak Kota Banjarmasin dijadikan tuan rumah PON ke-VII melihat kondisi perekonomian daerah tersebut yang tidak memungkinkan akibat hiperinflasi yang terjadi tahun 1965.

Di saat yang bersamaan, Jawa Timur telah berhasil menumpas sarang PKI di Blitar Selatan dalam Operasi Trisula. Panglima Kodam VIII Brawijaya, M. Jasin, beserta prajurit dan perwira yang terlibat didalamnya berhasil menangkap sisa-sisa PKI yang berusaha melakukan pemberontakan setelah G30S/PKI dan pada tanggal 7 September 1968 Operasi Trisula dinyatakan selesai. Melihat kesuksesan tersebut, Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku ketua umum KONI pusat, menunjuk serta menyerahkan mandat kepada Jawa Timur untuk mengadakan PON yang pertama pada masa Orde Baru ini. Selain itu, Jawa Timur dianggap sudah berhasil melakukan peng-Orba-an terhadap wilayahnya.

Dipilihnya Kota Surabaya sebagai tuan rumah PON ke-VII merupakan sebuah kebanggaan bagi Kota Surabaya. Namun, di sisi lain pemerintah Kota Surabaya merasa terbebani. Kas keuangan yang dimiliki pemerintah Kota Surabaya pada waktu sangat minim, apalagi diberlakukannya kebijakan efisiensi dana. Kondisi perekonomian di Jawa Timur di nilai paling buruk pada masa awal kepemimpinan Orde Baru, pendapatan per kapita di Jawa lebih rendah dibandingkan dengan berbagai propinsi yang ada di Sumatera dan Kalimantan.

Sebenarnya, infrastruktur penunndukung perhelatan PON ke-VII sudah banyak dibangun di Kota Surabaya antara rentang waktu tahun 1950 sampai 1961. Hanya Stadion Tambaksari yang berdiri kokoh, meskipun membutuhkan renovasi ulang untuk dapat menampung penonton perhelatan PON ke-VII serta direncanakan untuk membuat perkampung bagi atlet peserta PON ke-VII. Berikut adalah daftar-daftar lapangan olahraga yang dimiliki Kota Surabaya selain Stadion Tambaksari pada tahun 1952:

Tabel 3.1
Daftar Lapangan Olahraga yang sudah ada di Surabaya Tahun 1952

Letak	Kepemilikan	Pemakai	Kegunaan
Pasiran	A.L.R.I	A.L.R.I	Sepak Bola
Sawahpulo	Kota Besar Surabaya	Assyabaa b	Sepak Bola
Sidotopo	Jawatan Kereta Api	Tidak Jelas	Sepak Bola

²¹ *Arsip Kota Surabaya* Box 2.356 No. 70.812.... dalam Rina Krisnawati, *Lotere Totalisator di Surabaya Tahun 1968-1969*, (skripsi Mahasiswa Departement Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, 2010, tidak diterbitkan), hlm 51.

²² M. F Siregar. 2008. *Matahari Olahraga Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Kampung Seng	Jawatan Kereta Api	Tiong Hwa	Basket
Sidodadi Baru	Jawatan Kereta Api	Tiong Hwa	Basket
Kemayoran	Kota Besar Surabaya	Tidak Jelas	Basket
Tambakrejo	Kota Besar Surabaya	Persebaya	Sepak Bola
Taman Rangkah	Kota Besar Surabaya	Tidak Jelas	Hockey dan Basket
Tambaksari	Kota Besar Surabaya	S.K.V.B	Sepak Bola
Tambaksari	Kota Besar Surabaya	Tidak Jelas	Basket
Tambaksari	Kota Besar Surabaya	Persebaya	Sepak Bola
Jl. Kusuma Bangsa	Tiong Hwa	Tiong Hwa	Sepak Bola dan Basket
Jl. Pacar Keling	Jawatan Kereta Api	S.R.V.B	Sepak Bola dan Basket
Jl. Sawentar	Jawatan Kereta Api	Tidak Jelas	Basket
Pacar Keling III	Jawatan Kereta Api	Tidak Jelas	Sepak Bola
Karang Menjangan	Kota Besar Surabaya	A.S.C	Hockey dan Tenis
Embong Sawo	S.C.L.T.A	S.C.L.T.A	Hockey dan Tenis
Sawahan	O.J.S	Tidak Jelas	Sepak Bola
Kalibokor	Braat	Braat	Sepak Bola
Jl. Indragiri	T.H.O.R	T.H.O.R	Sepak Bola dan Basket
Jl. Bogowonto	Kota Besar Surabaya	Tidak Jelas	Sepak Bola

Sumber : Arsip Kota Surabaya No. Sementara 3981 No. Box 117, tentang pembuatan atau penembahan lapangan olahraga didalam Kota Surabaya.

Berdasarkan daftar tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 1952 Kota Surabaya memiliki banyak lapangan yaitu sebanyak 21 lapangan, yang difungsikan untuk beberapa tujuan. Lapangan yang berada di Kota Surabaya paling banyak dimiliki oleh Pemerintah Kota besar Surabaya yaitu sebanyak 9 lapangan yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Surabaya. Sedangkan untuk lapangan yang lain kepemilikannya dipegang oleh Jawatan Kereta Api sebanyak 6 lapangan. Sisanya dimiliki oleh Tiong Hwa, ALRI, SCLTA, OJS, Braat dan THOR.

Selain masalah kurangnya kas yang di miliki pemerintah Kota Surabaya, KONI yang merupakan badan pemerintahan yang menaungi olahraga di Indonesia tidak memberikan biaya sepeser pun kepada pemerintah Kota Surabaya untuk penyelenggaraan pesta olahraga berskala nasional ini. Sehingga, biaya untuk pelaksanaan PON ke-VII harus ditanggung dan diusahakan oleh daerah itu sendiri.²³

²³ Handoyo, *Pengorbanan Rakyat Jatim untuk PON VII*, dalam *Majalah Sketsmasa* No. 98-TH-XII-1969, hlm 20.

2. Lotto sebagai Penyokong Dana PON ke-VII.

Kolonel Acub Zainal, menyatakan kesediaannya dan kesanggupan dirinya dalam memimpin berlangsungnya PON ke-VII pada tahun 1969 di Surabaya, Jawa Timur. Kolonel Acub Zainal menyatakan sanggup serta bertanggungjawab untuk mencari dana untuk membangun sarana olahraga beserta perlengkapan lainnya demi berlangsungnya PON ke-VII. Sehingga, Acub Zainal ditunjuk sebagai Ketua I Eksekutif Panitia Besar PON VII.²⁴

Kolonel Acub Zainal mengusulkan untuk melakukan pelegalan judi, yaitu lotto, untuk membiayai pesta PON ke-VII nantinya. Hal tersebut langsung disetujui oleh M. Jasin, selaku Panglima Kodam VIII Brawijaya, beliau memberikan ijin untuk dilaksanakannya lotto. Tindakan berani yang di ambil Kolonel Acub Zainal tersebut sangat beresiko memancing reaksi masyarakat. Namun, Kolonel Acub Zainal tetap bersikeras dan langkahnya tidak dapat dihalangi lagi, karena menurutnya PON ke-VII membawa misi tertentu yang dapat mempertaruhkan eksistensi Jawa Timur di mata pemerintahan Orde Baru. *Pertama*, PON ke-VII merupakan PON pertama dalam pemerintahan Orde Baru yang baru saja dijalankan. *Kedua*, Jawa Timur harus kembali bangkit untuk menjadi perhatian nasional. Dan *ketiga*, yang paling penting dari tujuan sebelumnya, ialah rasa kesatuan nasional karena sebelumnya masyarakat Indonesia sempat di landa was-was dan rasa curiga antara satu sama lain setelah peristiwa G30S/PKI.²⁵ Dengan demikian, PON ke-VII nantinya diharapkan menjadi pesta olahraga terbesar dan termegah daripada pelaksanaan PON sebelumnya.

Selain itu, alasan lotto dipilih sebagai pendanaannya karena kondisi Indonesia yang pada saat sedang mengalami keterpurukan ekonomi pasca Orde Lama. Kebijakan sanering yang diberlakukan pemerintah untuk memulihkan keadaan ekonomi Indonesia, membuat turunnya produktivitas industri di Kota Surabaya. Ditambah lagi dengan diberlakukannya kebijakan efisiensi anggaran yang makin menyusahkan daerah-daerah di Indonesia. Dalam kebijakan efisiensi anggaran, yang diberlakukan dalam tiap-tiap jenjang pemerintahan, mulai dari pusat sampai daerah. Dana yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk daerah hanya sedikit dan terbatas. Sehingga, tidak mungkin mengandalkan keuangan dari pemerintah untuk mendanai pelaksanaan PON VII.

Penyelenggaraan lotto PON ini berdasarkan Surat Izin Menteri Sosial Republik Indonesia No. B. A. 5-2-24/18, yang dikeluarkan dengan tujuan membantu pendanaan acara PON VII tahun 1969. Lotto PON resmi di buka pada 14 Februari 1969 di bawah tanggungjawab Panitia Besar PON VII. Lotto PON diundi tiap tiga kali seminggu, yakni pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu pada jam 22.00 WIB di Markas Panitia Besar PON VII di Jalan Pemuda No.15 Surabaya. Pembelian kupon undian

²⁴ Nurinwa Ki. S. Hendrowinoto, *Acub Zainal: I Love The Army*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm 47.

²⁵ Nurinwa Ki. S. Hendrowinoto, *Acub Zainal: I Love The Army*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm 47.

lotto PON dapat dijumpai di Jl. Pemuda, Yos Sudarso, Embong Malang sampai THR.

3. Pelaksanaan PON ke-VII.

Pada tanggal 26 Juli 1969 tepatnya pada hari Sabtu pagi, diadakan Apel Besar untuk persiapan terakhir yang telah dikerjakan oleh Panitia PON VII, bertempat di Gelora Pancasila Surabaya. Acara ini diikuti oleh seluruh Panitia Besar PON beserta seluruh stafnya.

Pada tanggal 26 Agustus 1969 bertepatan dengan hari Selasa, merupakan hari yang paling menegangkan untuk Panitia Besar PON VII sekaligus hari yang paling menyenangkan dan membanggakan bagi masyarakat Jawa Timur. Tepat di hari tersebut pembukaan PON VII diadakan. Tepat pukul 12.00 WIB gerbang Gelora 10 November 1945 mulai di buka dan di tutup kembali tepat pada pukul 15.00 WIB. Banyak penonton yang kecewa karena tidak bisa masuk kedalam stadion sedangkan tiket sudah di tangan. Jam 15.15 WIB presiden Soeharto datang. Jam 16.50 acara di mulai dengan sangat meriah dan di buka oleh Presiden Soeharto serta pelepasan burung merpati, penerbangan balon-balon di sertai dengan dentuman meriam menandai dimulainya PON VII.

Setelah diresmikan oleh Presiden Soeharto dengan pertunjukan serta susunan acara yang sangat meriah pada 26 Agustus 1969. Acara PON pun di mulai dan pertandingan-pertandingan pun mulai dilaksanakan oleh atlet dari 30 cabang olahraga dari tiap-tiap kontingen daerah di Indonesia. Para atlet tersebut dituntut untuk menjunjung tinggi sportivitas, disiplin dan juga kerjasama sehingga dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan di antara mereka sebagai Bangsa Indonesia.

PON VII berakhir pada 6 September 1969 dengan Kota Jakarta sebagai juara umum yang memperoleh medali emas paling banyak. Berikut adalah daftar medali yang diterima para kontingen dari berbagai daerah:

Tabel 3.4
Hasil-hasil Medali yang diterima Tiap Kontingen dalam PON VII

No.	Kontingen	Emas	Perak	Perunggu
	D. C. I Djakarta Raya	102	70	50
	Djawa Timur	64	64	55
	Djawa Barat	32	50	42
	Djawa Tengah	15	23	36
	Sumatera Utara	13	15	21
	Sulawesi Selatan	10	10	15
	Kalimantan Selatan	4	4	5
	Bali	2	1	2
	Jogjakarta	2	-	9
	Kalimantan Timur	2	2	3
	Kalimantan Barat	1	1	1

	Maluku	1	1	3
	Sumatera Selatan	1	1	3
	Lampung	1	-	-
	Irian Barat	1	-	-
	Nusa Tenggara Barat	1	-	1
	Riau	1	-	-
	Sulawesi Utara	-	1	5
	Atjeh	-	-	2
	Nusa Tenggara Timur	-	-	2
	Kalimantan Tengah	-	1	2
	Sumatera Barat	-	1	1
	Sulawesi Tengah	-	-	-
	Djambi	-	-	-
	Sulawesi Tenggara	-	-	-
	Bengkulu	-	-	-

Sumber : Hasil2 Medali Jang Diterima Tiap Kontingen Dalam PON VII,... dalam Majalah Sketsmasa, No. 99-Th-XII-1969, hlm 21.

Melihat perolehan medali di atas, pembinaan olahraga di daerah-daerah luar Jawa kurang begitu maksimal sehingga daerah Sulawesi Tengah, Jambi, Sulawesi Tenggara dan Bengkulu menempati posisi terbawah. Kurang maksimalnya pembinaan olahraga di daerah Luar Jawa disebabkan kurang dana yang dimiliki pemerintah daerah tersebut sehingga pemerintah kurang perhatian terhadap olahraga di daerahnya. Para atlet yang berasal dari daerah tersebut juga kurang pelatihan di dalam bidangnya masing-masing. Berbeda jika kita melihat Kota Jakarta Raya yang keluar sebagai juara dalam PON VII tahun 1969, Jakarta sudah mempersiapkan atletnya dengan begitu matang.. Gubernur Ali Sadikin memfasilitasi para atlet yang akan berlaga di dalam PON VII.

Setelah PON VII berakhir, Panitia Besar PON VII telah menorehkan prestasi untuk Jawa Timur, sebab acara PON VII merupakan acara PON yang termewah dan termegah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lotto PON yang dilakukan oleh Panitia Besar PON Ke-VII tahun 1969 di Surabaya memberikan sumbangan yang sangat besar untuk kelancara PON VII tahun 1969 tersebut, utamanya dalam bidang infrastruktur keolahragaan di Kota Surabaya. Stadion Tambaksari merupakan contoh nyata yang mendapat sokongan dana lotto PON. Biaya yang dikeluarkan untuk merenovasi stadion tersebut ± Rp. 222.000.000, dana yang digunakan dari hasil pengorbanan masyarakat Jawa Timur lewat lotto PON yang diadakan panitia PON ke-VII. Saat peresmiannya, Stadion Tambaksari kemudian diganti dengan nama Gelora 10 November 1945, hal ini dimaksudkan untuk

mengingat jasa-jasa serta semangat para pahlawan yang gugur dalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya juga berhasil membangun dua gedung Sekolah Dasar di Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Gubeng. Separuh dari hasil lotto digunakan selain untuk perbaikan Stadion Tambaksari, juga digunakan untuk memperbaiki *elektrifikasi* kota, perbaikan dan perluasan tempat rekreasi seperti THR (Taman Hiburan Rakyat), Pantai Kenjeran, Gedung Balai Pemuda, dan Kebun Binatang Surabaya serta pembangunan stasiun TV. Hasil dari pengadaan lotto PON juga digunakan untuk membiayai pelebaran Jalan Darmo untuk dijadikan jalan protokol serta penutupan jalur trem kota yang sudah sejak lama berhenti beroperasi. Mengenai rincian pembangunan menggunakan dana hasil lotto PON tidak jelas, pemerintah Kota Surabaya tidak mengeluarkan perincian dana dan hasil pembangunannya yang pasti dan jelas. Tidak ada keterbukaan dari pihak pemerintah tentang jumlah dana dan apa saja hasil pembangunannya.

C. KONTROVERSI LOTTO DALAM PON KE-VII TAHUN 1969 DI KOTA SURABAYA

Lotto yang berhasil mensukseskan acara PON VII dan berhasil memperbaiki serta membangun fasilitas-fasilitas publik untuk pendukung acara PON VII. Namun, jauh sebelum pelaksanaan PON VII dan lotto PON masih dalam tahap wacana, sudah banyak kontroversi yang timbul didalam masyarakat. Banyak pihak yang tidak setuju serta menolak pencarian dana PON menggunakan lotto.

1. Reaksi Masyarakat Terhadap Adanya Lotto Dalam PON Ke-VII.

a. Kelompok Kontra.

Sejak masih dalam tahap usul dan wacana, lotto PON VII telah banyak menuai kritikan. Kritik itu berasal dari berbagai golongan di masyarakat, baik dari kalangan mahasiswa, beberapa pemerintah daerah kabupaten dan terutama sekali dari golongan tokoh agama. Dilihat dari perspektif keagamaan, lotto dianggap sebagai judi dan judi itu hukumnya haram. Tiap-tiap agama melarang penganutnya untuk bermain judi.

Pada awal penyelenggaraannya, lotto telah mendapat teguran keras dari beberapa organisasi Islam yang menginginkan pemerintah Kota Surabaya memberikan penjelasan yang mendetail tentang alasan diadakannya lotto dalam sidang pleno DPRD-GR Kotamadya Surabaya. Organisasi Islam tersebut diantaranya adalah Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan Partai Sarekat Islam Indonesia. Meskipun di dalam agama judi dilarang dan merupakan perbuatan dosa, namun terdapat beberapa golongan agamawan yang berpendapat lain terhadap legalitas lotto. Dapat dikatakan bahwa di dalam golongan agamawan terdapat perspektif yang berbeda-beda terhadap lotto yang diadakan. Salah seorang tokoh pemikir Agama dan Sastrawan besar Islam, Dr. Hamka, menanggapi soal judi dan lotto. Dr. Hamka menyatakan, bahwa melarang keras perjudian dalam struktur negara pada waktu itu sangat mudharat, jauh lebih berbahaya akibatnya daripada jika berada dibawah pengawasan pemerintah.

Penolakan terhadap legalisasi lotto, meskipun bertujuan untuk memperbaiki serta mengadakan pembangunan dan sebagai pendanaan PON VII tahun 1969 di Kota Surabaya, di pimpin oleh seluruh Dewan Mahasiswa perguruan tinggi yang ada di Kota Surabaya.²⁶ Diantaranya adalah Universitas Airlangga, Institut Teknologi Sepuluh November, IKIP (Universitas Negeri Surabaya), dan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel. Mereka menolak pelegalan lotto karena lotto dapat menjadi masalah baru bagi Kota Surabaya serta lotto yang merupakan judi dapat merusak moral masyarakat. Selain dianggap dapat merusak moral, lotto juga dianggap sebagai simbol kebebasan setelah sekian lama masyarakat dibelenggu oleh tekanan politik dibawah naungan Orde Lama. Para Dewan Mahasiswa ini juga beranggapan bahwa kebebasan ini dapat menimbulkan sebuah euphoria yang berlebihan di masyarakat sehingga akan timbul efek-efek negatif yang akan berdampak buruk pada masyarakat sendiri.

Selain mahasiswa dan tokoh-tokoh agamawan, ada beberapa kabupaten-kabupaten yang juga menolak lotto, seperti Kabupaten Mojokerto dan Ponorogo. Kedua kabupaten tersebut mengirimkan surat yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan pelaksanaan lotto PON. DPRD-GR Kabupaten Ponorogo mendesak bupati Ponorogo untuk segera menghentikan penjualan dan peredaran segala macam bentuk lotto serta segala jenis perjudian di Kabupaten Ponorogo. lotto PON yang juga beredar Kabupaten Ponorogo dianggap membawa pengaruh buruk terhadap perekonomian yang dapat menjurus kearah kemerosotan ekonomi. Selain itu, lotto PON juga membawa dampak kemerosotan moral di kalangan masyarakat, utamanya anak kecil.²⁷

Surat pernyataan yang dikeluarkan oleh DPRD-GR Kabupaten Mojokerto juga serupa dengan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh DPRD-GR, yaitu menuntut pelarangan segala bentuk penjualan dan peredaran lotto di Kabupaten Mojokerto. Lotto PON yang beredar luas di daerah Mojokerto membawa pengaruh buruk bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto yang menjurus pada kerusakan mental dan moral serta terganggunya keamanan dan ketenangan hidup masyarakat. Lotto PON juga dianggap membawa pengaruh-pengaruh yang tidak baik dalam kehidupan ekonomi rumah tangga dan pendidikan masyarakat Kabupaten Mojokerto.²⁸

b. Kelompok Netral.

Golongan ini terdiri dari semua usia, baik tua-muda maupun laki-laki dan perempuan. Mereka cenderung bersikap acuh dan cuek dengan euphoria lotto yang tengah terjadi di masyarakat. Ada atau tidaknya lotto,

²⁶ Riskon Pulungan, "Buku, Nasi, dan Revolusi: Dinamika Sosial-Politik Dewan Mahasiswa Universitas Airlangga 1957-1978", (Skripsi Mahasiswa Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, 2008, tidak diterbitkan), hlm 73-74.

²⁷ *Arsip Kota Surabaya* No. Definitif 740.

²⁸ *Ibid.*

sikap mereka sama saja. Mereka tidak menolak dan juga tidak mendukung lotto.²⁹

Golongan ini tidak ikut bermain lotto dan mempunyai pandangan bahwa lotto merupakan sebuah judi dan akan berakibat dosa apabila mereka ikut terjun di dalamnya. Sikap mereka terhadap lotto ditunjukkan dengan cara tidak membeli nomor kupon lotto. Golongan ini juga beranggapan bahwa lotto yang diselenggarakan pemerintah Kota Surabaya dengan alasan perbaikan infrastruktur kota dan pencarian dana untuk acara PON VII pada tahun 1969. Jadi, mereka ini tidak dapat menolak pelegalan judi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya karena nanti hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat Kota Surabaya dan pemerintah Kota Surabaya mengadakan lotto demi kepentingan masyarakatnya.

c. Kelompok Pro.

Golongan ini terdiri dari penjual dan pembeli kupon lotto serta pemerintah Kota Surabaya. Dapat dikatakan bahwa golongan inilah yang berhasil mensukseskan pembangunan dan perbaikan infrastruktur kota yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya. Mereka juga yang berhasil membantu pemerintah untuk mensukseskan terselenggaranya acara PON VII tahun 1969.³⁰ Melalui uang yang mereka gunakan untuk membeli kupon lotto, Panitia Besar PON VII tahun 1969 berhasil membangun stadion megah yang bertaraf internasional yaitu Gelora 10 November 1945. Beberapa perbaikan jalan Kota Surabaya turut dilakukan menggunakan uang hasil pembelian kupon lotto PON. Golongan pro ini membeli kupon lotto dan mempertaruhkan sejumlah uang dengan harapan dapat mendapatkan hadiah yang besar. Saat nomor yang mereka pasang tidak keluar pada saat pengundian, mereka akan berusaha membeli kupon lotto sekali lagi dengan nomor yang berbeda.

Selain pembeli, golongan ini juga terdiri dari penjual kupon lotto. Dari merekalah kupon-kupon lotto dapat terjual habis sehingga mampu menghasilkan uang yang cukup banyak untuk perbaikan kota dan penyelenggaraan PON VII. Lotto menjadi berkah tersendiri bagi penjualnya. Banyaknya yang masyarakat yang membeli lotto dan pendapatan yang diperoleh penjual lotto, membuat beberapa orang beralih untuk menjadi penjual kupon lotto.

pemerintah Kota Surabaya termasuk dalam golongan pro. Pelegalan judi dianggap mampu menambah pendapat Kota Surabaya. Pertambahan pendapatan Kota Surabaya inilah yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan dan perbaikan serta penyelenggaraan PON VII tahun 1969.

2. Respon Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Kontroversi Lotto PON Yang Terjadi di Masyarakat.

Kolonel Acub Zainal selaku Ketua I Panitia Besar PON VII yang bertanggungjawab secara langsung terhadap lotto PON untuk pendanaan PON VII.

Keputusan tersebut diambil untuk kepentingan Kota Surabaya sendiri sebagai tuan rumah PON VII. Karena apabila terjadi kesalahan sedikit saja pada saat perayaan PON VII yang akan menanggung malu adalah Kota Surabaya sendiri sebagai tuan rumah. PON VII merupakan PON pertama pada masa Orde Baru, sehingga nantinya akan meningkatkan eksistensi Kota Surabaya dan Jawa Timur di mata nasional. Kolonel acub Zainal juga mempunyai visi, dengan diadakannya PON VII mampu meningkatkan kembali nasionalisme dan juga rasa kesatuan dan persatuan antar masyarakat Indonesia yang sempat terkikis setelah adanya G30S/PKI.

M. Jasin selaku Panglima VIII Kodam Brawijaya yang bertanggungjawab penuh atas perizinan lotto PON. Ulama Jawa Timur menegur M. Jasin karena memberikan perizinan pengadaan lotto. M. Jasin menyatakan kepada para ulama Jawa Timur yang menentang kebijaksanaannya, bahwa tanpa lotto mereka tidak dapat mengumpulkan dana sangat besar yang dibutuhkan untuk perayaan PON VII dalam waktu singkat. Lotto jalan satu-satunya yang harus digunakan untuk kesuksesan perayaan PON VII tahun 1969.

Kolonel Acub Zainal pernah mendatangi sebuah undangan dari beberapa ulama dan organisasi pemuda di Surabaya. Kolonel Zainal mendengar banyak suara-suara yang menentang lotto PON. Saat tiba waktunya Kolonel Acub Zainal maju mimbar, dibawanya juga salah seorang asistennya, yaitu Letkol. Sunjoto. Kemudian, Kolonel Acub Zainal meminta asistennya tersebut untuk membuka pakaian. Para hadirin undangan tersebut kaget melihat tubuh Letkol. Sunjoto penuh bekas luka. Kemudian Kolonel Acub Zainal berkata:³¹

“Dimanakan tuan-tuan berada pada saat perjuangan berlangsung. Luka-luka anak buahku ini merupakan bukti bahwa ia turut andil dalam mendirikan republik yang kini kita rasakan. Dan sekarang masuk akalkah apabila kami juga yang akan menghancurkan negeri ini? Tidak saudara-saudara. Kami terlalu cinta dengan negeri ini.”

Anggapan para ulama dan organisasi pemuda Surabaya bahwa lotto tersebut termasuk judi dan dapat merusak moral masyarakat, ditepis oleh Kolonel Acub Zainal melalui pidatonya diatas. Kolonel Acub sebagai orang yang turut berjuang meraih kemerdekaan dengan susah payah. Tidak mungkin lotto PON digunakan untuk hal-hal yang tidak baik sehingga dapat merusak moral masyarakat. Kolonel Acub Zainal hanya ingin membuat bangga masyarakat Kota Surabaya saat perayaan PON VII nantinya.

3. Fenomena Yang Muncul di Masyarakat Akibat Adanya Lotto PON.

Fenomena ini cenderung tidak masuk akal. Namun, banyak dilakukan oleh orang-orang yang senang membeli kupon lotto dengan tujuan agar nomor yang mereka tuliskan didalam kupon bisa keluar saat

²⁹ Wawancara dengan Bapak H. Haryono (Pensiunan Rumah Potong Hewan, Jl. Jagalan Gg. 1 No. 42), 20 Mei 2015.

³⁰ Handoyo, *Pengorbanan Rakyat Jatim Untuk PON VII*, dalam *Majalah Sketsmasa* No. 98-TH-XII-1969, hlm 20.

³¹ Nurinwa Ki. S. Hendrowinoto, *Acub Zainal: I Love The Army*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm 52.

pengundian lotto. Fenomena tersebut diantaranya adalah bertanya nomor lotto kepada orang gila dan peramal.

Mbah R. A Rahayu, merupakan salah satu peramal yang terkenal dikalangan pemain lotto. Mbah Rahayu biasanya beroperasi di rumahnya, di Kampung Ngaglik.³² Mbah Rahayu cukup sukses dalam meramal angka-angka lotto yang keluar saat pengundian. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya orang-orang yang berduyung datang ke rumahnya, baik tua ataupun muda. Selain Mbah Rahayu, peramal lainnya yang terkenal adalah anak berusia empat tahun, yang bernama Riyadi. Anak kecil ini tinggal di rumahnya di Kampung Karangrejo, Wonokromo.³³ Anak tersebut dipercaya mampu memberikan angka-angka lotto yang keluar saat pengundian. Anak tersebut meramal dengan cara memberikan isyarat dengan gerakan tangan maupun tingkah lakunya sehari-hari.

Pemain lotto juga banyak yang berdatangan ke tempat-tempat keramat hanya untuk mendapatkan nomor.³⁴ Tempat keramat yang paling banyak didatangi para pemain lotto adalah kuburan dan pohon-pohon tinggi yang telah berumur tua. Salah satu tempat-tempat keramat yang banyak dikunjungi pemain lotto adalah makam peneleh.³⁵ Makam ini ramai dikunjungi setiap harinya oleh pemain lotto dengan tujuan akan mendapatkan angka bahagia. Tetapi pada saat hari pengundian lotto PON, jumlah orang yang datang makam ini semakin meningkat.

PENUTUP

Judi yang awalnya dilarang, membuat masyarakat bermain judi secara sembunyi-sembunyi. Pada tahun 1960-an judi dilegalkan di Indonesia. Pelegalan judi ini bertujuan untuk melakukan pembangunan di Indonesia. Akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran dan kebijakan sanering menyebabkan seluruh daerah di Indonesia mengalami kesulitan didalam pembangunan.

Di Kota Surabaya, yang merupakan daerah terbesar kedua setelah Jakarta, keadaan ekonomi tersebut dirasa sangat memberatkan. Terlebih lagi Kota Surabaya ditunjuk sebagai tuan rumah PON VII tahun 1969 dan KONI tidak memberikan biaya sedikitpun untuk pelaksanaan pesta olahraga tersebut. Pemerintah Kota Surabaya mengambil keputusan untuk menutupi kekurangan anggaran yang terjadi, yaitu dengan dilakukannya pelegalan perjudian. Pemerintah Kota Surabaya merasa dirugikan oleh banyaknya judi undian yang berasal dari daerah lain yang tersebar di Kota Surabaya. Sehingga, pemerintah merasa judi-judi tersebut

akan lebih menguntungkan apabila diselenggarakan dengan mandiri agar uang yang dikeluarkan masyarakat Kota Surabaya untuk membeli kupon undian tidak mengalir ke daerah lain.

Penggunaan lotto untuk pendanaan PON VII sebenarnya menimbulkan perbedaan sikap di dalam masyarakat. Ada yang menentang, hanya besikap netral, bahkan ada yang sangat antusias mendukung. Hal tersebut karena PON merupakan even olahraga nasional bergengsi yang tentunya nama daerah dipertaruhkan didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip:

- Arsip Kota Surabaya No. Definitif 736
- Arsip Kota Surabaya No. Definitif 740
- Arsip Kota Surabaya No. Definitif 909
- Arsip Kota Surabaya No. Sementara Br. 8575 Definitif 1057
- Arsip Kota Surabaya No. Sementara Br. 8588 Definitif 1058
- Arsip Kota Surabaya No. Sementara Br. 8587 Definitif 1059
- Arsip Kota Surabaya No. Sementara Br. 9625 Definitif 1069
- Arsip Kota Surabaya No. Sementara Br. 8589 Definitif 1070
- Undang-undang No. 22 Tahun 1954.

Buku:

- A. Daliman. 2012. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.
- Booth, Anne dan Peter McCawley. 1981. *Ekonomi Orde Baru*. Malaysia: Oxford University Press.
- Booth, Anne; William J. O'Malley; Anna Weidemann. 1988. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Brigitta Isworo Laksmi dan Pramastuti Handayani. 2008. *MF Siregar: Matahari Olahraga Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Deddy Hendro Subekti. 2007. *Reaksi Masyarakat Surabaya Terhadap Tingginya Inflasi dan Kebijakan Sanering*. Surabaya: Skripsi Mahasiswa Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Airlangga. Tidak diterbitkan.
- Engkos Kosasih. 1971. *Pendidikan Olahraga I*. Jakarta: Penerbit Karang Laut.
- Gugus Tugas Dana Pendukung PON XIII/1993 Jakarta. 1993. *Panduan dan Promosi PON XIII Jakarta 09-20 September 1993*. Jakarta: Badan Pelaksanaan Penerbitan Buku Panduan dan Promosi PON XIII/ 1993, Direktorat Publikasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafik Departemen Penerangan.
- Haryanto. 2003. *Indonesia, Negeri Judi?*. Jakarta: Yayasan Khasanah Insan Mandiri.
- Juniansyah Ramadhanis. 2010. *Stadion Tambaksari Surabaya 1954-1970*, Surabaya: Skripsi Mahasiswa Departement Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Tidak diterbitkan.

³² Ichsan Ridha, *Peramal Lotto: Mbah R.A "Rahaju"*, dalam Majalah *Liberty* 12 Juli 1969, hlm 3.

³³ *Masyarakat Makin Demam Lotto*, dalam Majalah *Liberty* 08 Agustus 1969, hlm 8.

³⁴ Wawancara dengan Bapak Kemiewagiman (Pekerja Swasta, Jl. Genteng Bandar II/38A Surabaya) pada tanggal 20 Mei 2015.

³⁵ Wawancara dengan Bapak H. Haryono (Pensiunan rumah potong hewan, Jl. Jagalan Gg. I No. 42) pada tanggal 20 Mei 2015

- Kartini Kartono. 2007. *Patologi Sosial I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurinwa Ki S Hendrowinoto, dkk. 1998. *Acub Zainal: I Love The Army*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nurinwa Ki S Hendrowinoto, dkk. 1998. *M. Jasin "Saya Tidak Pernah Minta Ampun Kepada Soeharto"*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Max Karudeng. 1980. *Pasang Surut Supremasi Bulu Tangkis Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Papanek, Gustav F. 1980. *Ekonomi Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Purnawan Basundoro. 2009. *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang Sejak Kolonial Sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: Ombak.
- Ramadhan K. H. 1995. *Pers Bertanya, Bang Ali Menjawab*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Ricklefs, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Rina Krisnawati, *Lotere Totalisator di Surabaya Tahun 1968-1969*. 2010. Skripsi Mahasiswa Departement Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Tidak diterbitkan.
- Riskon Pulungan. 2008. *"Buku, Nasi, dan Revolusi: Dinamika Sosial-Politik Dewan Mahasiswa Universitas Airlangga 1957-1978"*. Surabaya: Skripsi Mahasiswa Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Tidak diterbitkan.
- Sub Bagian Humas dan Protokol Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. 1980. *Surabaya Dalam Lintas Pembangunan*. Surabaya: Sub Bagian Humas dan Protokol Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- Koran:**
- Jayabaya, 31 Agustus 1969.
- Kedaulatan Rakyat, 12 November 1968.
- Kedaulatan Rakyat, 13 November 1968.
- Kompas, 3 Juni 1969.
- Surabaya Post, 20 April 1968.
- Surabaya Post, 27 April 1968.
- Surabaya Post, 10 Mei 1968.
- Surabaya Post, 12 September 1968.
- Surabaya Post, 5 Oktober 1968.
- Surabaya Post, 6 Oktober 1968.
- Surabaya Post, 23 Oktober 1968.
- Majalah:**
- Liberty No. 594, 23 Januari 1965.
- Liberty No. 825, 28 Juni 1969.
- Liberty No. 827, 12 Juli 1969.
- Liberty No. 831, 8 Agustus 1969.
- Liberty No. 833, 23 Agustus 1969.
- Liberty No. 834, 30 Agustus 1969.
- Liberty No. 835, 6 September 1969.
- Sketsmasa No. 64-Th-XI-1968.
- Sketsmasa No. 92-Th-XII-1969.
- Sketsmasa No. 99-Th-XII-1969.